
Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Menangani Konflik Rohingya di Myanmar Tahun 2016 – 2017

Revina Putri Setiani¹, Asep Setiawan², Djoni Gunanto³, Cecep Effendi⁴

^{1,2,3} Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Banten, Indonesia

⁴ Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Banten, Indonesia

E-mail: revinap71@gmail.com¹, asep.setiawan@umj.ac.id², djoni.gunanto@umj.ac.id³, cecep.effendi12@gmail.com⁴

Abstrak

Kelompok etnis Rohingya di Myanmar telah mengalami diskriminasi dan marginalisasi sistematis sejak 1962, yang berpuncak pada penolakan kewarganegaraan dan pembatasan akses layanan dasar. Pemerintah Myanmar dan Bangladesh sama-sama menolak mengakui Rohingya sebagai warga negara, menyebabkan mereka berada dalam kondisi stateless. Konflik etnis yang meningkat, terutama setelah serangan militer Myanmar pada 2017, memaksa ratusan ribu Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan negara-negara lain. Laporan dari PBB dan organisasi hak asasi manusia mengindikasikan adanya pembersihan etnis, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan terhadap Rohingya. Meski ada tekanan internasional, pemerintah Myanmar, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi, menyangkal adanya penindasan. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) berperan sebagai inisiator dan mediator dalam upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik ini, namun tantangan besar tetap ada dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan dan adil bagi Rohingya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam konflik Rohingya di Myanmar tahun 2016 – 2017. Dalam penelitian ini, konsep organisasi internasional dan human security digunakan dalam menganalisis bagaimana peran OKI dalam menyelesaikan konflik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tipe penelitian secara deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada empat peran OKI, pertama dan kedua sebagai inisiator dan mediator, di mana sebagian besar peran OKI di sini adalah mengadakan pertemuan- pertemuan dengan anggota-anggota negara OKI kan bantuan ke para pengungsi Rohingya. Ketiga yaitu humanitarian, memberikan bantuan atas hak asasi kemanusiaan yang dimiliki oleh Rohingya, dan yang keempat adalah fasilitator, di mana OKI, organisasi internasional lainnya, dan negara-negara anggota OKI saling bekerja sama untuk memberikan bantuan-bantuan pokok dan fasilitas seperti pendidikan dan kesehatan ke Rohingya.

Kata kunci: OKI, Rohingya, Peran, Negara, Hak Asasi Manusia

Abstract

The Rohingya ethnic group in Myanmar has experienced systematic discrimination and marginalization since 1962, culminating in denial of citizenship and restrictions on access to basic services. The governments of Myanmar and Bangladesh have both refused to recognise the Rohingya as citizens, leaving them in a stateless state. The escalating ethnic conflict, especially after Myanmar's military offensive in 2017, forced hundreds of thousands of Rohingya to flee to Bangladesh and other countries. Reports from the UN and human rights organizations indicate ethnic cleansing, including killing, rape and torture of the Rohingya.

Despite international pressure, Myanmar's government, including leader Aung San Suu Kyi, denies any repression. The Organization of Islamic Cooperation (OIC) is acting as an initiator and mediator in diplomatic efforts to resolve this conflict, but major challenges remain in creating sustainable and equitable solutions for the Rohingya. This study aims to examine the role of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) in the Rohingya conflict in Myanmar in 2016 – 2017. In this study, the concepts of international organizations and human security are used in analyzing the role of the OIC in resolving the conflict. This study uses qualitative methods and descriptive research types. This study concludes that there are four roles of the OIC, the first and second as initiators and mediators, where most of the OIC's role here is to hold meetings with OIC members to provide assistance to Rohingya refugees. The third is humanitarian, providing assistance for the human rights of the Rohingya, and the fourth is the facilitator, where the OIC, other international organizations, and OIC member countries work together to provide basic assistance and facilities such as education and health to the Rohingya.

Keywords: *OIC, Rohingya, Roles, Country, Human Rights*

PENDAHULUAN

Kelompok etnis Rohingya di Myanmar secara sistematis telah didiskriminasi dan dipinggirkan sejak 1962. Etnis Rohingya adalah kelompok Muslim terbesar di Myanmar yang berjumlah sekitar 1,3 juta orang (IPHRC, 2018). Rohingya telah lama terpinggirkan sehingga mereka ditolak warga Myanmar dan mereka tidak diakui sebagai kelompok etnis. Warga Myanmar percaya bahwa etnis Rohingya berasal dari Bangladesh, sedangkan orang-orang Bangladesh percaya bahwa orang Rohingya berasal dari Myanmar. Baik negara Myanmar maupun Bangladesh tidak mau mengakui bahwa Rohingya adalah warga negara mereka. Dalam sebuah laporan dari PBB, tentara Myanmar diduga telah melakukan pembersihan etnis Rohingya di wilayahnya (Nicola Smith, 2017).

Sejak kemerdekaan negara Myanmar pada tahun 1948, kelompok etnis Rohingya di Myanmar telah mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan eksploitasi sistematis, yang berujung pada konflik bersenjata internal yang diprakarsai oleh kelompok etnis tersebut. Tetapi tindakan ini terutama dirasakan selama kudeta militer pemerintah dan perebutan kekuasaan pada tahun 1962. Pada tahun 1982 undang-undang kewarganegaraan mereka ditinggalkan dan hanya 40.000 dari 1,33 juta orang yang menerima kewarganegaraan (International, 2015). Gregory H. Stanton mengatakan bahwa hanya 4000 orang yang diberi identitas, tetapi pemerintah mengganti nama mereka menjadi "Bengali" dengan cerita palsu bahwa mereka adalah imigran Bangladesh (Stanton, 2017). Akibat dari Undang Undang tersebut, akses etnis Rohingya menerima layanan keperawatan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan terbatas (International, "Terpenjara tanpa atap": Apartheid di negara bagian Rakhine di Myanmar, 2017).

Menurut organisasi pemberi bantuan Medecins Sans Frontieres (MSF), setidaknya 6.700 Rohingya telah terbunuh dalam sebulan sejak pecahnya kekerasan, termasuk setidaknya 730 anak di bawah usia lima tahun. Menurut Amnesty Internasional, Myanmar telah memperkosa dan melecehkan perempuan dan gadis Rohingya. Pemerintah Myanmar menyebutkan jumlah korban yang tewas yaitu 400 orang. Mereka mengklaim Operasi "pembersihan" terhadap militan berakhir pada 5 September, tetapi koresponden BBC melihat bukti bahwa operasi masih berlanjut setelah tanggal tersebut (BBC, 2020).

Konflik di Rakhine tengah dalam beberapa tahun terakhir yang menyebabkan 140.000 sebagian besar etnis Rohingya, melarikan diri pada tahun 2012 (Commission, 2018). Desa Du Chee Yar Tan menentang Muslim Rohingya sehingga pembunuhan, pemerkosaan, deportasi paksa penduduk, penangkapan sewenang-wenang, penahanan, penyiksaan dan pelanggaran hukum humaniter internasional (OIC, 2014). Pada Agustus 2017, militer melakukan

penangkapan disertai kekerasan sebagai balasan atas serangan kelompok bersenjata Rohingya di pangkalan polisi di Myanmar Utara, mengirim 420.000 orang ke Bangladesh (Economist, 2017). Berdasarkan informasi yang dihimpun Al Jazeera dari berbagai organisasi kemanusiaan yang menyebabkan pelarian sekitar satu juta Muslim Rohingya sejak operasi militer brutal pertama antara tahun 1977 sampai tahun 2017. Mereka mengungsi ke negara tetangga seperti Asia Tenggara dan Timur Tengah (Al-Jazeera, 2017).

Organisasi migrasi internasional PBB, IOM, menyebut eksodus pengungsi Rohingya merupakan yang terbesar dan tercepat dibandingkan aksi kekerasan lainnya seperti konflik di Rwanda dan Irak. Kepala Lembaga Hak Asasi Manusia PBB Zeid Ra'ad Al-Husseini menyebut kasus itu " contoh buku teks tentang pembersihan etnis." (Maung Zarni, 2017). Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa sepertiga dari pengungsi terkena dampaknya minoritas Rohingya dapat digambarkan sebagai pembersihan etnis (BBC, Sekjen PBB: Kasus Rohingya adalah 'pembersihan etnis. ', 2017). Menurut Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, dampak kekerasan berdampak negatif terhadap situasi hak asasi manusia, khususnya di Asia Tenggara (Nadlir., 2017). Menurut UNICEF, anak-anak paling terpengaruh. UNICEF melaporkan bahwa hampir 30% anak di bawah usia 5 tahun menderita gizi buruk sedang atau berat dan lebih dari separuh anak hidup di bawah garis kemiskinan (Manik, 2017).

Masalahnya, Pemerintah Myanmar tidak terbuka dan transparan kepada masyarakat internasional, sehingga ini bukan Respon yang tepat. Pemimpin Myanmar dan peraih Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi menyangkal segala bentuk penindasan terhadap Muslim Rohingya dan telah berulang kali gagal mengutuk serangan yang terjadi. Suu Kyi menghindari menyebut Rohingya, menyatakan dalam pidatonya bahwa tidak ada kekerasan dan pembersihan desa-desa lagi, seperti yang terjadi pada Agustus 2017 lalu (Atin Prabandari, 2018). Suu Kyi bahkan menyalahkan pekerja bantuan internasional, termasuk perwakilannya sebagai pihak yang membantu kelompok Islam menyerang 30 kantor polisi (Manik, 2017).

Untuk mengatasi masalah ini, selain solusi bilateral, tindakan multilateral juga dilakukan organisasi internasional. Di antara sekian banyak organisasi internasional, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) merupakan salah satu organisasi yang memiliki peran untuk memimpin inisiatif penyelesaian tersebut. Organisasi yang mewakili mayoritas negara Muslim ini memiliki posisi terbaik dibandingkan dengan organisasi internasional lainnya (Al-Hasan, 2017). OKI memiliki keanggotaan terbesar kedua di dunia setelah PBB. Negara- negara anggota OKI telah menerima 25 juta pengungsi atau 61,5% dari pengungsi dunia. Sebanyak 10 dari 50 konflik bersenjata di dunia terjadi di negara-negara OKI (Desk, 2017). Hal ini dapat mempengaruhi motivasi dan minat negara-negara anggota OKI untuk membantu pengungsi dan menyelesaikan konflik yang diserahkan kepada organisasi yang lebih kompleks dan secara kelembagaan lebih kuat (Tirta, 2020). Menurut Presiden Kazakhstan Nizar Bayef yang masih menjabat, keputusan ini menjelaskan perubahan tahapan kerja menjadi lebih baik dan upaya peningkatan kinerja di berbagai bidang (Abdullah, 2011).

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti sudah menganalisis terlebih dahulu data- data yang sudah dilakukan yang berhubungan dengan tema dan topik mengenai konflik peran OKI dalam menangani konflik etnis Rohingya. Riset-riset sebelum itu jadi studi pustaka untuk melakukan riset lebih mendalam terhadap komponen-komponen yang akan diteliti.

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Tiara Dewinta et al., (2016) dengan judul, "Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam menangani konflik etnis Rakhine- Rohingya di Myanmar tahun 2012 – 2013" dalam *Journal of International relations*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran OKI selama konflik etnis antara Rakhine dan Rohingya di Myanmar pada tahun 2012. Ini menunjukkan bahwa peran OKI adalah inisiator, fasilitator, dan mediator. OKI telah berupaya memenuhi perannya sebagai IGO (Intergovernmental

Organizations) atau Organisasi Antar Pemerintahan dalam menyelesaikan konflik antara etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar.

Penelitian Artikel Jurnal yang ditulis oleh Cantika Niscala Puri, Gonda Yumitro (2022) dengan Judul, "Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Penguatan Diplomasi Islam." Dalam Jurnal Sosial Politik. Tujuan jurnal ini adalah menganalisis peran OKI dalam memperkuat diplomasi Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan diplomasi Islam OKI yang mengedepankan perdamaian dan kerjasama untuk memecahkan masalah yang dianggap tepat untuk melindungi dan membela kepentingan vital umat Islam dan mencari solusi untuk menyelesaikan konflik.

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Jordy Adam, Verry (2019) dengan Judul "Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya dalam Skripsi Tahun 2022." Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana peran dan mekanisme pelaksanaan peran OKI dalam penyelesaian konflik Rohingya. Penelitian ini disimpulkan bahwa OKI sebagai salah satu organisasi internasional yang berfokus pada hak asasi kelompok minoritas yang mampu berpartisipasi dalam konflik yang muncul antara pemerintah Myanmar dan kelompok etnis Muslim Rohingya. Pelanggaran yang terus terjadi terhadap komunitas Muslim Rohingya di Myanmar sangat membutuhkan solusi dan jalan keluar untuk menghentikannya. Banyak etnis Rohingya yang mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, bahkan sampai kehilangan nyawa.

Penelitian tesis yang ditulis oleh Dwi Darma Putri Alda (2022) dengan judul, "Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Menangani Konflik Etnis Rohingya Myanmar tahun 2017-2019 dalam Tesis tahun 2022." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran apa saja yang dilakukan OKI dalam menangani konflik Rohingya pada tahun 2017-2019, yang sebelumnya OKI telah berperan aktif pada tahun 2012. Hasil penelitian ini adalah kejadian diskriminasi yang terjadi pada etnis Rohingya, yang mengakibatkan konflik etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2012, sehingga menarik perhatian internasional. Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui Peran apa saja yang dilakukan OKI dalam menangani konflik Rohingya tahun 2017-2019 yang sebelumnya OKI telah berperan aktif pada tahun 2012.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, oleh karena itu penelitian ini fokus pembahasannya pada bagaimana peran OKI dalam diplomasi Pemerintah negara – negara OKI dalam menangani Konflik Rohingya tahun 2016 – 2017.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan dipakai memakai pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Menurut (Lamont, 2014), berpendapat bahwa strategi pemeriksaan subjektif adalah pengumpulan informasi dan metode penyelidikan atau prosedur pemeriksaan untuk mengumpulkan informasi non- matematis. Teknik subyektif digunakan untuk lebih mudah memahami bagaimana dunia meliputi kita dan mengharapkan kita untuk memusatkan perhatian pada signifikansi dan siklus isu-isu legislatif global. Hal ini sering kali dilakukan melalui penyelidikan mendalam terhadap orang, keunikan, lokasi, negara, dan asosiasi individu. Teknik subyektif mengumpulkan dan membedah informasi dengan menggunakan bahasa yang dikomunikasikan dan disusun, bukan angka. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat memperoleh ilustrasi bagaimana peran OKI terhadap konflik Rohingya di Myanmar tahun 2016-2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran OKI sebagai Inisiator

Rohingya yang sebagian besar mengungsi ke Bangladesh, dengan banyaknya tuduhan seperti pemerkosaan, dan penyiksaan. Adanya isu tersebut, OKI sebagai Lembaga Organisasi Internasional berperan melakukan berbagai pertemuan dengan memprakarsai dalam

melakukan pertemuan – pertemuan. Dalam sub bab ini, Peneliti akan menjelaskan bagaimana Peran OKI sebagai inisiator.

Mengenai Inisiator yaitu menginisiasi Berbagai Pertemuan atau Mendesak beberapa pihak untuk segera bertindak. Pertama ketika OKI telah mendapatkan laporan yang adanya tuduhan kekerasan seperti pembunuhan di luar hukum terhadap Muslim Rohingya, pemerkosaan dan penyiksaan dan menyusul dengan serangan yang dilakukan oleh pemberontak tak dikenal terhadap fasilitas perbatasan Myanmar pada tanggal 9 Oktober 2016 oleh pasukan keamanan di Kotapraja Maungdaw dan desa - desa lain di negara bagian Rakhine utara. Lalu mengakibatkan kematian beberapa personil keamanan dan pemberontak. OKI pun menyerukan penyelidikan penuh atas insiden tersebut untuk menentukan pelakunya dan membawa mereka ke pengadilan. Situasi ini telah menyebabkan banyak orang Rohingya meninggalkan Desa mereka dan blokade yang terjadi di wilayah tersebut juga menyebabkan banyak orang di wilayah menghadapi kekurangan makanan, air, dan kebutuhan pokok yang kritis. Sekretaris Jenderal OKI, Badan Iyad Ameen Madani meminta seluruh pihak yang berkepentingan untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan dan menghindari eskalasi situasi. Beliau mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat Rohingya.

Kedua yaitu pada Akhir bulan November 2016, situasi di daerah Rakhine, Myanmar semakin memburuk. Laporan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Rohingya seperti penyiksaan, pemerkosaan dan eksekusi mendadak. (OIC, OIC Expresses Concern at Deteriorating Situation in Rakhine State, Myanmar. , 2016). OKI lebih lanjut mengungkapkan keprihatinannya dengan Sekretaris jenderal OKI, Dr. Yousef A. Al- Othaimem menyerukan segera penghentian kekerasan di Myanmar pada awal Desember 2016. Beliau menyatakan sangat penting bagi Pemerintah Myanmar untuk mengambil langkah-langkah yang jelas dan tegas untuk membendung kekerasan dan memulihkan perdamaian di wilayah tersebut. Disusul juga dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh negara-negara anggota OKI, yang menyoroti keprihatinan atas kekerasan dan memburuknya situasi kemanusiaan yang dihadapi Rohingya. Sekretaris Jenderal bahwa merupakan Kewajiban Piagam Negara-Negara Anggota OKI untuk " menjaga hak, martabat dan identitas agama dan budaya komunitas Muslim dan minoritas di non negara anggota. Beliau lebih lanjut menyerukan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penderitaan Rohingya kepada pemerintah Myanmar di setiap kesempatan dan tetap terlibat dalam masalah ini (OIC, OIC Calls for Immediate Cessation of Violence in Myanmar., 2016).

Ketiga yaitu pada tahun 2017 bulan September, OKI mengutuk kembali pecahnya kekerasan yang menimpa Muslim Rohingya yang menyebabkan ribuan orang meninggalkan rumah mereka ke negara tetangga Bangladesh. Hal ini terlihat dalam penghancuran banyak desa dan rumah secara sistematis dan terorganisir oleh kelompok yang main hakim sendiri dan menyamar sebagai tentara dan polisi. Khususnya di kawasan No. 5 di Kota Maungdaw. Penyalahgunaan Kekuatan militer termasuk artileri berat terhadap penduduk sipil, yang menyebabkan lebih dari 20.000 warga Rohingya mengungsi di seluruh wilayah. Sekretaris Jendral OKI pun menyerukan kepada dewan keamanan PBB untuk mengatasi masalah ini. Lalu menyerukan kepada negara-negara anggota OKI untuk mematuhi resolusi yang diadopsi dalam sidang darurat dewan menteri luar negeri di Kuala Lumpur Tanggal 19 Januari 2017 (OIC, OIC Condemns Renewed Violence in Myanmar and Calls Upon UNSC to Address the Issue., 2017).

Dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa OKI melakukan tugasnya sebagai inisiator, lebih banyak diarahkan kepada pernyataan-pernyataan untuk melakukan pertemuan-pertemuan negara Muslim yang mendesak pemerintah Myanmar sinyal kepada Myanmar bahwa negara-negara muslim yang di bawah OKI memberikan dukungan moral ataupun support. OKI sudah melakukan inisiator secara publisitas dan memang sudah ramai di dunia internasional, dengan organisasi internasional lainnya. Akan tetapi dampak terhadap Rohingya

tidak berubah. Bahkan menurut para analisa tidak ada perubahan. OKI sebagai organisasi internasional mempunyai kekurangan juga, yaitu OKI tidak punya kekuatan untuk memaksakan kehendak Myanmar. Maka inisiator OKI pun hanya sebatas diplomasi. Tidak ada hasil yang konkret, karena Myanmar bukan negara anggota OKI.

Myanmar yang sebagai non-member State, pergerakan OKI pun juga terbatas. Hambatan lain juga muncul ketika negara anggota OKI sendiri terkadang tidak ingin mengikuti apa yang OKI desak atau sarankan ke Rohingya. Untuk itu OKI sangat sadar untuk tidak terlalu mencampuri urusan negara manapun. Ketika masalah minoritas muslim diangkat (Soleman, 2017).

Peran OKI sebagai Mediator

Penulis menganalisis peran OKI sebagai mediator, yaitu mengirim perwakilan atau delegasi suatu negara anggota OKI atau OKI sendiri yang mengunjungi ke tujuan tempat tersebut. Pertama yaitu diadakannya Pertemuan Para Kelompok Menteri OKI di Sidang ke-43 Dewan Menteri Luar Negeri OKI, yang diselenggarakan di Ibukota Uzbekistan, pada 18- 19 Oktober 2016.

Dalam pertemuan tersebut, dalam pernyataannya yang akan disampaikan atas Namanya oleh Asisten Sekretaris Jenderal Duta Besar Urusan Kemanusiaan Hesham Youssef, Sekretaris Jenderal OKI, Iyad Ameen Madani, menekankan bahwa meskipun ada kemajuan yang dicapai dalam proses demokrasi, dan asumsi bahwa kekuasaan oleh kepemimpinan baru, terdapat bukti adanya kampanye kekerasan dan terror yang tidak berhenti dan sistematis terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.

Madani menunjukkan bahwa setelah 4 tahun kekerasan yang terjadi pada tahun 2012, bagian Rakhine, hampir 120.000 orang Rohingya masih tinggal di kamp - kamp pengungsi internal, mengingat kebijakan yang diadopsi oleh pihak berwenang di Myanmar, orang Rohingya masih tinggal di kamp - kamp pengungsi. Umat Islam terpaksa meminta bantuan pengungsi ke negara tetangga Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Selama para pencari tempat pengungsi ini tidak dapat kembali ke tanah airnya, beban negara yang menampungnya akan semakin meningkat. Madani juga menekankan bahwa OKI berupaya bekerja sama dengan pihak berwenang Myanmar di berbagai tingkatan dan menyerukan agar OKI mengadopsi kebijakan yang transparan dan komprehensif terhadap etnis minoritas agama. OKI menekankan perlunya menemukan cara untuk memberikan kewarganegaraan kepada masyarakat Rohingya dan menyatakan bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret dan positif untuk mencegah tindakan diskriminasi dan pelanggaran sistematis yang sedang berlangsung.

Pertemuan tersebut juga mengkaji laporan yang disampaikan oleh utusan khusus OKI untuk Myanmar, Mr. Tan Sri Hamid Albar. Pada akhir pertemuan, sebuah laporan dikeluarkan yang mendesak pemerintah Myanmar untuk berkomitmen terhadap kewajibannya berdasarkan hukum internasional dan konvensi hak asasi manusia, untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri tindakan kekerasan dan diskriminasi Muslim Rohingya. Ditambah juga menyerukan kepada pemerintah Myanmar untuk mengembalikan kewarganegaraan Rohingya yang dicabut berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 (OIC, Madani: *Despite Some Progress the Campaign of Violence and Terror Against the Rohingya People Continues.* , 2016).

Kedua yaitu pada 30 November Tahun 2017, OKI menyambut baik kunjungan Paus Fransiskus ke Myanmar dan penegasan kembali dukungannya terhadap pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi nasional untuk keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kunjungan ke Myanmar ini sangat penting untuk menyoroti penderitaan masyarakat, khususnya Muslim Rohingya yang menghadapi ketidakadilan dan penganiayaan.

OKI Menghargai seruan Paus kepada pemerintah Myanmar untuk " Menghormati setiap kelompok etnis" dan seruannya kepada negara tersebut bahwa " Perbedaan agama tidak perlu

menjadi sumber pemecahan dan ketidakpercayaan, melainkan kekuatan untuk persatuan, pengampunan, toleransi dan pembangunan bangsa yang bijaksana ke depannya." Saat Paus melakukan perjalanan ke Bangladesh dan mengunjungi kamp pengungsi Rohingya, beliau akan bertemu dengan mereka yang menjadi korban kekerasan karena etnis dan agama mereka.

OKI pun menegaskan kembali penghargaannya kepada pemerintah Bangladesh atas upaya untuk memenuhi kebutuhan pengungsi Rohingya dalam jumlah besar di negara tersebut dan menegaskan kembali seruan-seruan kepada negara-negara anggota OKI untuk mendukung Bangladesh dalam upaya kemanusiaan ini. OKI telah memperhatikan perjanjian antara Bangladesh dan Myanmar untuk memulangkan warga Rohingya ke tanah air mereka dan menyatakan bahwa perjanjian tersebut harus secara jelas menyebutkan syarat dan ketentuan, termasuk jumlah pengungsi yang akan dipulangkan dan memberikan jaminan keamanan. OKI pun menegaskan kembali seruannya kepada pemerintah Myanmar agar pengungsi Rohingya harus diizinkan kembali dengan aman dan bermartabat ke tempat tinggal asal mereka dan pihak berwenang harus mengambil langkah nyata untuk mengatasi akar penyebab ketegangan di Rakhine, termasuk konflik anti Muslim. Retorika Rohingya dan anti Muslim yang dipromosikan oleh kelompok ekstremis sayap kanan di media cetak, publik dan media sosial (OIC, Welcomes Pope Visit to Myanmar. , 2017).

Dari uraian analisis di atas, bisa disimpulkan bahwa OKI melakukan tugasnya sebagai mediator yaitu mengadakan pertemuan untuk mengarahkan negara anggota OKI agar pengungsi Rohingya segera mengungsi ke negara anggota OKI dan ASEAN. Lalu OKI juga mengirim delegasi ke Pemerintah Myanmar untuk dukungan terhadap Rohingya.

Akan tetapi OKI kurang berusaha untuk mengirim delegasi perwakilan dari organisasi tersebut. Sehingga tanpa didesak OKI pun, beberapa negara-negara OKI sudah maju duluan untuk turun tangan ke Myanmar langsung, ataupun mengurus pengungsi Rohingya di negara masing-masing. Sehingga OKI pun juga dikritik karena kurang tegasnya mereka dalam mengirim delegasi lebih awal.

Peran OKI sebagai Humanitarian

Penulis akan menganalisis penanganan OKI terhadap muslim Rohingya. Penulis sebelumnya sudah menjelaskan di gambaran umum bahwa para pengungsi Rohingya sudah mengungsi ke beberapa negara anggota OKI. Atas Kejadian tersebut OKI sangat berperan sebagai humanitarian.

Menurut (Hehir, 2010), humanitarian atau humanitarianisme adalah operasi kemanusiaan sebagai istilah yang digunakan para pekerjaan dan Organisasi Non Pemerintah, di mana istilah kemanusiaan diartikan sebagai tindakan yang altruistik, non politis, dan kepedulian dengan kepentingan untuk orang banyak.

Untuk itu, berikut Langkah Pertama yang OKI lakukan. Pada sesi Pertemuan di New York pembukaan Sidang ke-43 Dewan Menteri Luar Negeri, pada tanggal 18 – 19 Oktober 2016, Pidato Sekretaris Jenderal OKI, menjelaskan bahwa OKI terus memantau dengan penuh perhatian dengan situasi Muslim Rohingya di Myanmar.

Dengan kasus marginalisasi, deprivasi, dan pengucilan mereka. Komisaris di PBB untuk hak asasi manusia menegaskan fakta ini dalam laporannya tanggal 20 Juni 2016, yang menunjukkan penderitaan yang terus berlanjut terhadap warga Rohingya dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka.

Beliau menyatakan bahwa hal ini dibahas dan didiskusikan panjang lebar dalam di sela-sela sidang umum dengan ibu Aung San Suu Kyi, penasihat negara Myanmar. Pertemuan tersebut merupakan kesempatan untuk menegaskan kembali posisi OKI mengenai perlunya mengembangkan rencana dan program yang praktis dan adil untuk memperbaiki situasi kemanusiaan diarahkan dan perlunya pemerintah Myanmar untuk memberikan perlindungan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat Rohingya termasuk hak dasar mereka atas kewarganegaraan. Baru-baru ini situasinya semakin memburuk dan dirusak oleh

kekerasan yang kembali terjadi dan terus-menerus menargetkan keselamatan komunitas Muslim.

Kejahatan teroris dan kekerasan yang terus berlanjut, terlepas dari semua tindakan pencegahan keamanan yang diadopsi oleh negara-negara, memerlukan lebih banyak upaya untuk menerapkan serangkaian undang-undang dan undang-undang anti-terorisme, mengundang kita, lebih dari sebelumnya, untuk menerapkan Konvensi OKI tentang Pemberantasan Terorisme Internasional tahun 1999, dan mengintensifkan kerja sama keamanan untuk melawan organisasi teroris transnasional dan menghilangkan jaringan kejahatan terorganisir, perdagangan senjata dan narkoba.

Beliau juga menantikan kerja sama lebih lanjut dengan komunitas internasional untuk mengembangkan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan semua dimensi keamanan, ekonomi, budaya, sosial dan intelektual, berfokus pada memerangi segala bentuk diskriminasi, ekstremisme dan kesalahpahaman agama, mencegah pengucilan dan diskriminasi intelektual, sentimen keterasingan, berupaya untuk meningkatkan toleransi dan moderasi serta mendorong dialog antar budaya dan antaragama.

Saat itu, Madani mengkhawatirkan dikeluarkannya Undang-undang AS yang dikenal sebagai JASTA, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum hubungan internasional, yaitu prinsip kekebalan kedaulatan suatu negara. Hal ini akan menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan internasional dan melemahkan upaya bilateral dan multilateral dalam memerangi terorisme dan pemberantasan kelompok teroris.

Sesi ini juga akan menandai pengumuman peluncuran Messaging Center yang berkoordinasi dengan International Islamic Fiqh Academy (IIFA), akan menindaklanjuti berita yang dipublikasikan di media sosial dan berupaya untuk menonjolkan suara nalar, mempromosikan citra Islam, moderasi dan toleransi Islam, mendidik generasi muda tentang bahaya bergabung dengan kelompok kriminal dan takfiri dan membimbing mereka dalam melayani negara dan kebaikan bersama.

OKI menyambut baik upaya Komisi Tetap Independen Hak Asasi Manusia (IPHRC) untuk memajukan isu-isu hak asasi manusia di dunia Islam, sambil menjunjung tinggi standar-standar internasional yang obyektif dan transparan, dan dalam mendobrak upaya-upaya yang diduga mengeksploitasi hak asasi manusia untuk melemahkan negara-negara Islam, stabilitas politik dan kedaulatan negara-negara anggota.

OKI juga sangat memuji upaya Bank Pembangunan Islam (IDB) untuk mencapai pembangunan sosial dan ekonomi di Negara-negara Anggota dan mengembangkan program kemitraan dan kerja sama dengan struktur dan lembaga keuangan internasional. Saya juga sangat menghargai kepemimpinan bijaksana Dr. Ahmad Mohamed Ali selama bertahun-tahun menjabat sebagai presiden IDB. Saya juga mendoakan Dr. Bandar Hajjar sukses penuh dalam tugasnya sebagai Presiden IDB yang baru (OIC, Speech of His Excellency Iyad Ameen Madani Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation at The Opening Session of the Forty Third Session of the Council of Foreign Ministers., 2016).

Langkah Kedua yaitu diadakannya Pertemuan Darurat bulan Desember 2016 untuk membahas situasi Muslim Rohingya di Myanmar. Pengamat OKI di New York untuk PBB. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Duta Besar Muzaffarbek Madrahimov, Wakil Tetap Uzbekistan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kelompok OKI. Sekretariat Jenderal OKI diwakili oleh Duta Besar Agshin Mehdiyev, Pengamat Tetap Misi Pengamat OKI untuk PBB. Kelompok ini mendengarkan pengarahan informasi mengenai situasi tersebut dari berbagai sumber, termasuk Direktur Jenderal Uni Rohingya Arakan, Dr. Wakar Uddin, melaporkan situasi lapangan termasuk laporan penolakan hak asasi manusia, penangkapan sewenang-wenang, tidak manusiawi terhadap Rohingya di tahanan. Kamp - kamp pengungsian lebih dari 30.000 Rohingya sejak 9 Oktober 2016.

OKI menggarisbawahi perlunya Angkatan Bersenjata Myanmar untuk mematuhi

supremasi hukum dan pemerintah Myanmar untuk memfasilitasi penyelidikan yang benar benar independen terhadap laporan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya. Beserta meminta pelapor khusus PBB, Ibu Yanghee Lee untuk memberikan pengarahan kepada kelompok OKI di Jenewa dan dewan hak asasi manusia PBB untuk mempertimbangkan mengadopsi rancangan resolusi mengenai situasi hak asasi manusia di Myanmar.

Para Anggota juga menyerukan langkah-langkah serius yang harus diambil oleh OKI dan komunitas internasional untuk mendesak pemerintah Myanmar memastikan bahwa bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke Negara Bagian Rakhine serta mengatasi akar penyebab kekerasan, meningkatkan dialog antar-komunitas. untuk memastikan bahwa penduduk Rohingya yang mengungsi diizinkan kembali ke rumah mereka dengan aman (OIC, New York OIC Group Holds Emergency Meeting to Discuss Latest Situation of the Rohingya Muslim Minority in Myanmar., 2016).

Langkah Ketiga yaitu setelah adanya peralihan Sekretaris Jendral yang baru, Dewan Luar Negeri, Para Menteri OKI pada tanggal 15 Januari tahun 2017, menggelar Pertemuan Darurat Tingkat Menteri di Kuala Lumpur, Malaysia atas permintaan Pemerintah Malaysia untuk membahas situasi Muslim Rohingya di Myanmar. OKI telah meminta PBB untuk melakukan mediasi dengan pemerintah Myanmar untuk menghentikan meningkatnya kekerasan terhadap Muslim Rohingya. Karena OKI menekankan kehancuran lain akan terjadi, seperti di Kamboja dan Rwanda. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini, OKI akan membahas langkah-langkah untuk mengatasi situasi yang menimpa mayoritas Muslim Rohingya (News, 2017).

Isi hasil pertemuan darurat tersebut adalah sebagai berikut: (OIC, Final Communique Extraordinary Session of The OIC Council of Foreign Ministers (CFM) on The Situation of The Rohingya Muslim Minority in Myanmar. , 2017).

1. Mengingat Joint Communique yang ditandatangani pada tanggal 16 November 2013 antara OKI dan Komite Sentral Implementasi Stabilitas dan Pembangunan di Rakhine, Myanmar, yang menjadi landasan kerjasama di masa depan dan mendorong pemerintah Myanmar untuk melaksanakan semua komitmen bersama. Semua proses verifikasi inklusif dan transparan yang akan mengarah pada pemberian kewarganegaraan bagi minoritas Muslim Rohingya sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB No. 64/238.
2. Menghargai langkah awal yang diambil pemerintah Myanmar, seperti pembentukan Central Committee for the Implementation of Peace, Stability and Development (PSDC) di Rakhine State pada tanggal 30 Mei 2016, dan Rakhine State Advisory Commission pada tanggal 23 Agustus 2016, untuk memperbaiki kondisi komunitas yang rentan seperti Muslim Rohingya yang menghadapi berbagai diskriminasi dan terpaksa hidup seperti tinggal di kamp pengungsi internal atau Internally Displaced Persons (IDP's)
3. Mendesak Pemerintah Myanmar untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan perjanjian hak asasi manusia. Terutama mengembalikan kewarganegaraan Muslim Rohingya yang dicabut melalui Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982.
4. Pihak Myanmar yang berwenang untuk mengambil langkah- langkah efektif untuk mencegah krisis kemanusiaan. Seperti menyerukan Pemerintah Myanmar untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk memulihkan perdamaian dan keharmonisan antar masyarakat melalui dialog atau orasi untuk proses perdamaian dan rekonsiliasi nasional yang komprehensif yang melibatkan semua masyarakat di Myanmar. Hal ini menjadi inti dalam melawan ekstremisme dan terorisme dalam segala aspeknya.
5. Pertemuan tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada negara- negara anggota OKI yang telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena dampaknya. Lalu akan melanjutkan berbagi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara-negara yang telah menyediakan tempat penampungan sementara dan perlindungan bagi pengungsi Rohingya.

Prinsip pembagian beban dan tanggung jawab bersama, serta dalam semangat solidaritas Islam.

6. Pemerintah Myanmar untuk memastikan kebijakan yang inklusif dan transparan terhadap komunitas etnis dan agama. Dengan memasukkan minoritas Muslim Rohingya sebagai bagian integral dari proses ini dan menganggap mereka sebagai etnis minoritas, sebagaimana diserukan oleh Majelis Umum PBB.

Setelah membahas situasi minoritas Rohingya di Myanmar, dalam pertemuan tersebut, diputuskan hal - hal berikut:

1. Meminta Sekretaris Jenderal untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Myanmar agar delegasi tingkat tinggi dari kelompok kontak OKI mengunjungi Rakhine untuk bertemu dengan pejabat lokal dan minoritas Muslim Rohingya yang terkena dampak. Berhubungan dengan hal tersebut, pertemuan selanjutnya meminta kerjasama pemerintah Myanmar untuk menerima kunjungan ini.
2. Minta lebih lanjut Sekretaris Jenderal untuk lebih berinisiatif bersama dengan rekan-rekannya di PBB dan ASEAN, yang dapat mendukung Pemerintah Myanmar untuk mengembangkan dan melaksanakan dialog antar agama dan antar etnis di negara tersebut dan di kawasan Asia Tenggara yang lebih luas.
3. Meminta Kelompok OKI di New York, Jenewa dan Brussel untuk secara teratur meninjau situasi yang berkembang dan menelaah strategi keterlibatan yang berkelanjutan dengan Myanmar, PBB, Uni Eropa, dan Organisasi Internasional lainnya.
4. Mendorong Komisi Independen Hak Asasi Manusia Tetap OKI atau OIC Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC), untuk terus mengkaji situasi minoritas Muslim Rohingya di Myanmar sebagai isu prioritas dalam agendanya.

Dalam pertemuan di atas, perwakilan Indonesia dari Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengusulkan empat langkah dengan Negara-negara Anggota OKI untuk menambah upaya dalam mengatasi situasi dan keamanan di Rakhine, Myanmar. Marsudi pun menyampaikan pendapatnya yang selain menyampaikan keprihatinan terhadap situasi di Rakhine, menurut beliau langkah pertama yang dapat dilakukan negara-negara OKI adalah menawarkan bantuan guna mencegah situasi di Rakhine menjadi semakin buruk.

Langkah selanjutnya adalah negara-negara anggota OKI diharapkan dapat merangkul pemerintah Myanmar dengan baik. Kemudian untuk langkah ketiga, pemerintah Indonesia menyarankan agar negara-negara anggota OKI dapat bekerja sama dengan asosiasi ASEAN dalam menangani berbagai perspektif terkait isu Rakhine. Terakhir, khususnya pada langkah keempat, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa negara-negara anggota OKI menjadi kaki tangan dalam perubahan perekonomian Myanmar, misalnya peluang untuk bekerja sama dengan Islamic Development Bank. Dengan pernyataannya tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa Indonesia masih siap untuk bertindak sebagai perpanjangan tangan upaya mencari solusi praktis, misalnya dengan terus membantu kelompok masyarakat Muslim Rohingya di Rakhine (Arisandy, 2017). Pertemuan tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Malaysia atas keramah-tamahan dan pengaturannya yang sangat baik dalam menjadi tuan rumah pertemuan tersebut.

Ketiga yaitu adanya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerjasama Islam Pertama mengenai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (1st OIC Summit on Science, Technology and Innovation), yang diadakan pada hari Minggu, 10 September 2017, mengecam pemerintah Myanmar karena demonstrasi kekerasan yang disengaja terhadap Muslim Rohingya. Terlebih lagi, diminta untuk mengizinkan mencari fakta dan kebenaran oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Anggota OKI telah memutuskan untuk menginginkan badan-badan internasional menyelidiki semua pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional dan membawa para pelaku komunitas Rohingya ke pengadilan internasional. Pertemuan tersebut mengungkapkan keprihatinan Muslim Rohingya yang menyebabkan lebih

dari 270.000 Muslim melarikan diri ke Bangladesh (Islam, 2017).

Indonesia pun juga sudah menyuarakan haknya dalam pertemuan ini yang diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Myanmar dan Bangladesh. Beliau mengadakan pertemuan dengan Pejabat kedua negara untuk membahas masalah pengungsi yang menyeberang untuk menghindari meningkatnya kekerasan dan konflik di Rakhine yang terpecah belah. Dalam pertemuannya, beliau mengungkapkan pentingnya sebuah program "Formula 4+1". Pendekatan tersebut didukung secara kolektif oleh OKI, yang mencakup seruan kepada pemerintah Myanmar untuk mengatasi "meningkatnya ujaran kebencian dan penyebaran propaganda ekstremis sayap kanan terhadap populasi Rohingya" serta memastikan "hak setiap individu" untuk hidup dan bergerak tanpa rasa takut dan penganiayaan berdasarkan agama atau etnis mereka.

Keempat yaitu Pada 11 September 2017, Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia, Zeid Ra'ad Al Huseein, menyebut operasi militer kejam yang dilakukan pemerintah Myanmar sebagai contoh nyata pembersihan etnis. Ketika krisis kemanusiaan dan keamanan di Myanmar memburuk dengan cepat, semakin banyaknya seruan yang dibuat oleh para aktivis hak asasi manusia dan tokoh masyarakat agar masyarakat internasional meningkatkan tekanan diplomatik mereka terhadap pemerintah dan berbuat lebih banyak untuk melindungi kelompok minoritas Rohingya yang teraniaya di negara tersebut. Pernyataan ini juga disampaikan kepada negara tetangga Bangladesh dan India, yang kedekatannya memerlukan kemampuan yang lebih baik untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Myanmar yang membutuhkan (Sheany., 2017).

Berdasarkan dari uraian analisis di atas, bisa disimpulkan bahwa OKI sudah melakukan pertemuan di Kuala Lumpur untuk mencegah genosida. OKI juga menyatakan prihatin terhadap apa yang sudah terjadi pada Rohingya dengan mengeluarkan pernyataan kemanusiaan. Tetapi OKI tidak melakukan lebih dari ini karena bantuan kemanusiaan yang OKI lakukan tidak banyak. Seruan genosida pun juga hanya statement dan tidak ada tindakan lebih lanjut. Sehingga OKI tidak bisa menyelesaikan inti dari masalah konflik Rohingya. Program 4+1 yang sudah dijabarkan sebelumnya pun perlu mendorong OKI untuk menerima usulan strategi dari Indonesia tersebut (Syukur, 2017). Karena dalam kasus Rohingya ini, Indonesia merupakan negara The First Humanitarian Responder (Azizah, 2017). Indonesia yang bertindak sebagai aktor internasional sudah lebih cepat menangani hal ini dalam menjaga keamanan dan stabilitas dalam masalah etnis Rohingya di Myanmar. Indonesia pun sudah mengajak negara-negara OKI lainnya untuk lebih mengedepankan bantuan nyata guna membantu seluruh penduduk di Rohingya, dan membantu pihak di Myanmar juga untuk menyelesaikan akar permasalahan dari situasi yang dialami Rohingya.

Peran OKI sebagai Fasilitator

Penulis akan menjabarkan peran OKI sebagai fasilitator. OKI sudah menyatakan akan memfasilitasi sebuah delegasi tingkat tinggi untuk menyelesaikan masalah Rohingya. Pertama yaitu OKI mengecam pemerintah Myanmar atas 'tindakan kekerasan' terhadap etnis Rohingya dan meminta agar Pemerintah mengizinkan misi untuk mencari fakta oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi tersebut menyatakan bahwa badan-badan internasional harus memeriksa semua pelanggaran terhadap hukum hak asasi manusia internasional dan membawa pelaku pelanggaran terhadap komunitas Rohingya ke pengadilan internasional.

Keputusan ini diambil oleh anggota OKI pada Pertemuan Kepala Negara dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerjasama Islam pertama mengenai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (1st OIC Summit on Science, Technology and Innovation), yang berlangsung di Astana, Kazakhstan pada 10 September 2017. Sesuai dengan laporan Ketua OKI pada pertemuan tersebut bahwa mereka telah mendorong pemerintah Myanmar untuk segera mengambil tindakan agar pengungsi Rohingya kembali ke wilayah mereka di Rakhine.

Pertemuan tersebut juga mengundang usulan Komisi Penasehat Rakhine yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan. Sebagaimana dinyatakan dalam komisi tersebut, OKI mendorong semua negara anggota OKI untuk mengambil perannya dalam upaya masyarakat internasional untuk menghilangkan keterbatasan peluang kebebasan bergerak di wilayah Rakhine dan menjamin proses penyaringan kewarganegaraan yang mudah serta penerimaan ke administrasi sosial, sekolah dan kesehatan.

Pada akhirnya, anggota KTT sepakat untuk mengkoordinasikan pengiriman bantuan tambahan ke daerah-daerah yang terkena dampak di Myanmar, terutama makanan pokok dan obat-obatan. Ketua OKI yang saat ini dipegang Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyuarakan penilaiannya dan mendesak negara-negara Muslim untuk menggunakan segala cara yang tepat untuk menghentikan kekejaman yang dilakukan kepada masyarakat Rohingya. Beliau mengatakan Turki telah menawarkan bantuannya. Jadi beliau juga berharap pemerintah Bangladesh akan menuadiri kekejaman tersebut dan membantu umat Muslim Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh. Salah satu poin yang penting dalam kesepakatan negara-negara OKI adalah melakukan Upaya bersama untuk bisa menyelesaikan masalah Rohingya. Selain untuk mengakhiri perdebatan, dukungan pemerintah dan hak masyarakat Rohingya dalam menjalani kehidupan adalah prioritas utama dari perjanjian ini.

Negara-negara OKI saling sepakat bersama untuk mencari cara penting untuk menyelesaikan kasus Rohingya. Presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev menyatakan negara-negara yang tergabung di OKI sepakat untuk dapat mengatasi kemiskinan dan memenuhi kesejahteraan hak hidup masyarakat Rohingya. Nazar menyatakan keyakinannya bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi, negara-negara OKI dapat bekerja sama dengan Myanmar dalam proyek pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi etnis Rohingya (Islam, 2017).

Kedua saat itu, Pemerintah Myanmar melakukan berbagai operasi militer dan mekanisme diskriminatif untuk membatasi mobilitas dan pertumbuhan etnis Rohingya. Peristiwa ini menyebabkan meningkatnya gelombang pengungsi Rohingya ke negara-negara Asia Tenggara untuk mencari perlindungan. Malaysia, Thailand, dan Indonesia merupakan negara ASEAN yang menerima pengungsi Rohingya. Setiap tahunnya Malaysia menerima ribuan pengungsi Myanmar, dan jumlah pengungsi terbanyak terjadi pada tahun 2016 sebanyak 31.020 orang. Data yang diperoleh dari Bank Dunia dan UNHCR menunjukkan jumlah pengungsi Myanmar di atas 75 persen dari seluruh pengungsi di Malaysia.

Sebagai Organisasi Internasional, OKI bekerja sama dengan HUMANiTi Malaysia, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang mengadakan buka puasa bersama untuk merayakan Ramadhan dengan mempertemukan lebih dari 500 anggota komunitas pengungsi Rohingya setempat. Anggota-anggota keluarga dan anak-anak Rohingya ikut meriahkan keberkahan bulan suci dalam acara buka puasa yang digelar di Masjid Saidina Othman Ibn Affan, Kuala Lumpur, pada Sabtu 18 Juni 2016.

Direktur Jenderal Kabinet OKI dan Penasehat Khusus, Dr. Yusuf Al-Othaimeen, menyambut para tamu dan menyampaikan pidato atas nama Sekretaris Jenderal OKI, Mr. Iyad Ameen Madani, dalam mendukung upaya kemanusiaan untuk meringankan penderitaan dan kesulitan yang dihadapi para pengungsi Rohingya. Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus upaya utusan khusus OKI untuk Myanmar, Tan Sri Syed Hamid Albar dan Panitia-panitia penyelenggara buka puasa.

Dr. Al-Othaimeen juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Malaysia atas dukungan mereka terhadap masyarakat Rohingya dan upaya yang sudah dilakukan OKI Untuk meringankan penderitaan mereka. Upaya-upaya sedang diintensifkan untuk mengatasi situasi menyedihkan yang dihadapi para pengungsi, dengan penekanan pada penyediaan akses dasar terhadap Pendidikan dan medis bagi anak-anak. Program penjangkauan yang dilakukan baru-baru ini antara lain pembagian tas sekolah dan buku kepada anak-anak Rohingya di Kabupaten

Klang (300 anak), Ampang (600 anak), dan Serdang (120 anak). Hal ini dimungkinkan dengan alokasi yang diterima dari Dana Solidaritas Islam (Islamic Solidarity Fund / ISF) OKI yang berkantor pusat di Jeddah. Acara buka puasa ini juga menghadirkan Perwakilan dari Negara-Negara Anggota OKI, Kementerian Luar Negeri, Departemen Perdana Menteri, LSM dan berbagai entitas swasta yang turut memberikan dukungan (OIC, OIC Holds Iftar with Local Rohingya Community in Malaysia, 2016).

OKI pun lanjut mendistribusikan lebih dari 550 karung beras (1 karung / 50 kg) melalui LSM HUMANiTi Malaysia selama bulan Ramadhan. Dr. Syed Hamid Albar, Presiden HUMANiTi dan Utusan Khusus OKI untuk Myanmar sudah lebih dari 1.100 Keluarga yang tinggal di Sittwe, bagian Rakhine, Myanmar menerima bantuan. Syed Hamid mengatakan OKI bertekad untuk membantu para IDP dan pengungsi yang tinggal di kamp - kamp untuk mendapatkan akses dasar terhadap penghidupan serta mencoba mendirikan kantor di Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang akan bermanfaat bagi semua pengungsi, tanpa memandang latar belakang etnis.

Upaya bantuan ini merupakan bagian dari inisiatif yang diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal OKI, Mr. Iyad Ameen Madani untuk memastikan kebutuhan dan layanan dasar, termasuk perhatian medis dan pendidikan diberikan kepada pengungsi Rohingya. Awal bulan ini Sekjen menyelenggarakan acara buka puasa Ramadan bantuan bagi pengungsi di Malaysia melalui HUMANiTi (OIC, OIC Distributes Ramadan Aid to Rohingya Families in IPD Camps, 2016).

Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak pun meminta OKI ikut serta mendesak Myanmar. OKI mengadakan sidang darurat sidang Dewan Tinggi pada 19 Januari 2017 di Kuala Lumpur. Sidang darurat tersebut terkait dengan kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya. Selain menyerukan OKI untuk mendesak Myanmar, Najib Razak juga mengirimkan kapal yang membawa makanan dan pasokan darurat untuk Muslim Rohingya di Myanmar. Malaysia telah mengirimkan 2.200 ton bantuan ke kota dan pelabuhan terbesar Myanmar di Yangon.

Najib mengajak anggota OKI untuk bersama-sama mengambil tindakan dalam menangani Muslim Rohingya di Myanmar. Kesamaan aqidah dan syariah dengan etnis Rohingya juga menjadi alasan Najib terus membela isu Rohingya. Dalam hal ini, kasus Rohingya memberikan dampak emosional yang cukup besar bagi Najib. Menurut Najib, Pemerintah Myanmar seharusnya bisa menjamin hak asasi setiap warga negaranya, dan tidak melanggar dengan membiarkan atau melakukan kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Sebagai anggota OKI, Najib berinisiatif memanggil anggota OKI karena kesamaan agama dan solidaritas, sehingga tanggung jawab kasus Rohingya menjadi tanggung jawab anggota OKI. Najib juga mengatakan bahwa tindakan penyelamatan etnis Rohingya dari tindakan kekerasan yang terjadi di Myanmar merupakan kewajiban seluruh anggota OKI, karena hak untuk hidup sebagai manusia. Dengan mengusung semangat persaudaraan Muslim, Najib mengajak Negara-negara Anggota OKI untuk memberikan perhatian terhadap nasib Muslim Rohingya di Myanmar dan memberikan bantuan kepada mereka. Selain itu, Najib juga mengajak anggota OKI untuk memberikan perhatian terhadap isu-isu lain yang terjadi di seluruh dunia, jika ada masalah yang melibatkan umat Islam. Tindakan Najib diterima dengan baik oleh negara-negara anggota OKI, yang ditunjukkan dengan lahirnya resolusi terhadap kasus kekerasan terhadap etnis Rohingya dan mengirimkan utusan OKI ke Myanmar (Ekklesia, 2018).

Ketiga yaitu Pada Pertemuan Rutin OKI di sela - sela Sidang ke-43 Dewan Menteri Luar Negeri OKI (Council of Foreign Ministers / CFM), yang di selenggarakan di Ibu Kota Uzbekistan pada 18 - 19 Oktober 2016. Sekretaris Jendral OKI, meminta Pemerintah Myanmar untuk menghidupkan kembali kesepakatan pembukaan kantor OKI untuk urusan kemanusiaan Yangon setelah penandatanganan nota kerjasama antara kedua pihak. Kantor ini akan terlibat

dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan dan korban kekerasan tanpa diskriminasi (OIC, Madani: Despite Some Progress the Campaign of Violence and Terror Against the Rohingya People Continues, 2016).

Keempat saat Berselang ke tahun 2017, adanya Pertemuan Darurat Konferensi Luar Biasa Tingkat Menteri Luar Negeri OKI (Organisasi Kerjasama Islam) di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada hari Rabu 18 Januari tahun 2017, Perwakilan Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, menerangkan Konferensi Tingkat Menteri OKI akan membahas tentang situasi kemanusiaan di Rakhine. Arrmanatha juga menambahkan, Pertemuan Luar Biasa OKI, akan menghasilkan dua hal, yaitu Komunika dan resolusi. Komunika akan mengimplikasikan berbagai Langkah dan kemajuan ke masa depan yang diambil oleh OKI dalam mendukung Myanmar, sedangkan resolusi berisi situasi politik OKI dalam menjawab permasalahan di Rakhine. Resolusi ini akhirnya sudah diwujudkan di Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri OKI ke- 43 di Kazakhstan tahun lalu. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri konferensi tersebut.

Kelima yaitu setelah mengadakan pertemuan di Kuala Lumpur, Retno Marsudi berkunjung ke Myanmar untuk menyerahkan 10 kontainer bantuan kemanusiaan berupa makanan dan pakaian dari Pemerintah Indonesia yang diarahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Desember 2016, kepada pemerintah Myanmar. Menurut Arrmanatha, penerimaan bantuan tersebut, akan dilakukan di Rakhine. Salman Al-Farisi, Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Kelembagaan, mengungkapkan dalam kunjungannya ke Rakhine, Retno Marsudi akan mengesahkan dua sekolah yang sudah dibangun oleh Pemerintah Indonesia untuk melengkapi 4 sekolah yang dibangun Indonesia sebelumnya.

Beliau juga menegaskan, selain bantuan kemanusiaan lainnya yang bersifat krisis, Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan Lembaga Non-Legislatif yang fokus pada tiga bidang yaitu pendidikan, kesejahteraan, dan perekonomian. Kita bisa melihat contoh dari Walubi (Wali Umat Buddha Indonesia) yang ingin mendirikan klinik medis di Rakhine. Salman juga menegaskan, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas ekonomi serta kapasitas guru dan tenaga medis. Arrmanatha pun menambahkan, pihaknya terus berupaya agar dalam kunjungannya ke Myanmar, Retno Marsudi bisa bertemu dengan Aung San Suu Kyi. Kemudian tercatat Retno Marsudi pada Desember lalu mengunjungi kamp pengungsi Muslim Rohingya di Katupalong, Bangladesh. Kondisi di kamp pengungsi berpenduduk 19.000 orang di dekat perbatasan Myanmar ini sangat mengkhawatirkan. Retno Marsudi sebelumnya pernah bertemu dengan Kanselir Myanmar Aung San Suu Kyi pada awal bulan tersebut, dan keduanya berbincang mengenai perubahan yang terjadi di Rakhine sejak Oktober 2016 (Wardah, 2017).

Terakhir pada bulan November tahun 2017, PBB telah berhasil mengadopsi resolusi yang disponsori OKI terhadap Myanmar, yang sudah mengutuk operasi militer di Rakhine terhadap minoritas Muslim Rohingya. Resolusi yang diadopsi pada Komite Ketiga Majelis Umum ini, merupakan hasil dukungan internasional yang luas berkat kerjasama yang sudah dicapai OKI dengan banyak negara. Teks resolusi tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara negara-negara anggota OKI, khususnya negara Mesir, kerajaan Arab Saudi, Bangladesh, dan Turki.

Solusi tersebut menyerukan diakhirinya operasi militer yang sedang berlangsung. Berikut, yaitu memberikan akses penuh dan tanpa hambatan bagi penyampaian bantuan kemanusiaan oleh para aktornya. Seperti menjamin kepulauan secara sukarela dan berkelanjutan, dalam keamanan, keselamatan, dan martabat semua pengungsi internal. Untuk para pengungsi, akan dijamin penghormatan penuh terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi orang-orang yang tergabung dalam komunitas Rohingya, untuk mengakhiri semua perbatasan terhadap pergerakan mereka. Lalu memastikan akses penuh terhadap pelayanan kesehatan dan medis tanpa diskriminasi apapun.

Resolusi ini juga meminta pemerintah Myanmar untuk sepenuhnya melaksanakan rekomendasi komisi penasihat negara bagian Rakhine, untuk memungkinkan rekonsiliasi di antara semua komunitas yang tinggal di Rakhine dan untuk memulai proses pembangunan inklusif yang bermakna bagi semua komunitas. Seperti memberikan hak kewarganegaraan penuh, sesuai dengan proses yang transparan, kepada Muslim Rohingya di Rakhine, termasuk dengan meninjau Undang- Undang Kewarganegaraan Tahun 1982. Sekretaris Jenderal OKI, Dr. Yousef A. Al- Othaimen berterima kasih kepada negara-negara anggota dan komunitas internasional atas dukungan mereka terhadap resolusi ini dan akan terus berkomitmen untuk meringankan penderitaan komunitas Rohingya ke depannya (OIC, UN Adopts OIC Sponsored Resolution on Myanmar, 2017).

Berdasarkan hasil analisis di atas, bisa disimpulkan bahwa, peran OKI sebagai fasilitator memang mempunyai keterbatasan dalam hal tersebut. Karena OKI hanya bisa melakukan delegasi dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan negara- negara anggota OKI lainnya untuk melakukan penanggulangan bantuan memfasilitasi para pengungsi Rohingya. Lalu OKI tidak bisa banyak turun tangan sendiri secara langsung, dan harus bekerjasama dengan organisasi-organisasi internasional lainnya yang lebih kuat secara kuasa seperti PBB, dan bekerja sama dengan LSM di negara masing-masing untuk memberikan bantuan ke para pengungsi Rohingya.

Oleh Karena itu, jika ada kendala seperti pengungsi Rohingya yang terlalu banyak, negara setempat tidak bisa mengandalkan OKI yang peran besarnya hanya berdiplomasi dengan negara – negara anggota OKI lainnya. Negara tersebut akan langsung complain ke UNHCR yang selalu menangani krisis pengungsi Rohingya. Bila tidak ada tanggapan, topik tersebut bisa memanas di Masyarakat internasional, dan Tindakan UNHCR dan organisasi lainnya akan dipertanyakan yaitu apa Tindakan mereka atas kasus tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun OKI telah berupaya maksimal sebagai inisiator, mediator, humanitarian, dan fasilitator, dampaknya masih terbatas. Sebagai inisiator, OKI berhasil mengadakan berbagai pertemuan internasional untuk mendesak Myanmar menghentikan kekerasan terhadap Rohingya, tetapi hanya sebatas diplomasi tanpa hasil konkret, karena Myanmar bukan anggota OKI. Dalam peran mediator, OKI mengirim delegasi untuk berdialog dengan Myanmar dan negara-negara anggota lainnya. Namun, pengaruhnya terbatas dalam mengubah kebijakan Myanmar. Sebagai humanitarian, OKI memberikan bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar kepada pengungsi Rohingya, terutama di Bangladesh. Namun, bantuan ini tidak menyelesaikan masalah mendasar yang dialami para pengungsi. Dalam peran fasilitator, OKI memfasilitasi pertemuan-pertemuan tingkat tinggi dan bekerja sama dengan organisasi internasional seperti PBB dan UNHCR untuk mengatasi krisis ini. Meski upaya ini berhasil menarik perhatian dunia, tindakan konkret untuk menyelesaikan masalah Rohingya belum tercapai. Secara keseluruhan, meskipun OKI telah menjalankan berbagai peran dalam menangani krisis Rohingya, hasilnya masih terbatas. OKI perlu memperkuat kerja sama dengan organisasi internasional yang memiliki kekuatan lebih besar untuk menindaklanjuti upaya diplomasi dan bantuan kemanusiaan, guna mencapai solusi yang lebih konkret dan berkelanjutan bagi masyarakat Rohingya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2011. OKI Berganti Nama dan Logo. Islamedia. <https://www.islamedia.id/2011/06/OKI-berganti-nama-dan-logo.html>.
- Alda, D. W. I. D. P. (2022). *Peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) Dalam Menangani Konflik Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2017-2019*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Al-Hasan, Abdullah. 2017. The Rohingya crisis and the role of the OIC. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/opinions/2017/2/18/the-Rohingya-crisis-and-the-role-of-the-oic/>
- Al-Jazeera. 2017. Persecution path: Following Myanmar's fleeing Rohingya. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2017/9/6/persecution-path-following-myanmars-fleeing-Rohingya>.
- Al-Jazeera. Myanmar: Major ethnic groups and where they live. (2017). Diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2017/3/14/myanmar-major-ethnic-groups-and-where-they-live>.
- Archer, C. (2001). *International Organizations Third Edition*. Taylor & Francis E-Library.
- Arisandy, Yuni. Indonesia Usulkan Empat Langkah OKI untuk Rakhine. (2017), <https://www.antaraneews.com/berita/607876/indonesia-usulkan-empat-langkah-OKI-untuk-rakhine>.
- Atin Prabandari & Dio Herdiawan Tobing. 2018. Krisis kemanusiaan Rohingya: apa yang bisa dilakukan negara lain. *The Conversation*.
- Bakri, U.M. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakry, U. S. (1999). *Pengantar Hubungan Internasional*. Jakarta: Jayabaya University Press.
- Bennett, A. L. (1995). *International Organizations Principles and Issues sixth edition*.
- Bülbül, K., Islam, M. N., & Khan, M. S. (Eds.). (2022). *Rohingya Refugee Crisis in Myanmar: Ethnic Conflict and Resolution*. Springer Nature.
- Daily Sabah. 2017. OIC countries host 61.5 percent of global refugee population. Daily Sabah. <https://www.dailysabah.com/mideast/2017/05/30/oic-countries-host-615-percent-of-global-refugee-population>.
- Dewinta, R. T. A., Windiani, R., & Hanura, M. (2016). 14. Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OkI) Dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine-rohingya Di Myanmar Tahun 2012-2013. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 2(2), 127–134.
- Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall.
- European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations Report. (2018). Rohingya Crisis. Di akses dari <https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/system/files/2021-11/kr0421022enn.pdf>.
- Hehir, Aidan. (2010). *Humanitarian intervention: An introduction*. New York: Palgrave Macmillan
- <https://theconversation.com/krisis-kemanusiaan-Rohingya-apa-yang-bisa-dilakukan-negara-lain-91665>.
- Hubert, D. (1999). *Human Security: Safety for People in a Changing World*. Makalah yang dipresentasikan pada konferensi regional tentang The Management of African Security in the 21st Century.
- Ibrahim, A. (2018). *The Rohingyas: inside Myanmar's genocide*. Oxford University Press.
- IPHRC. (2018). *Report of the OIC-IPHRC Fact Finding Visit to Rohingya Refugees' Camps in Bangladesh to Assess Human Rights Situation of Rohingya Muslim Minority in Myanmar*.
- Islam, Panji. OKI Desak Myanmar Izinkan Tim PBB Selidiki Kejahatan Kemanusiaan terhadap

- Rohingya. (2017), <https://hidayatullah.com/none/2017/09/11/123408/OKI-desak-myanmar-izinkan-tim-pbb-selidiki-kejahatan-kemanusiaan-terhadap-rohingya.html>.
- Jordy Adam, V. (2019). *Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya*. Universitas Andalas.
- Kittichaisaree, K. (2021). *The Rohingya, justice and international law*. Routledge.
- Lamont, C. (2014). *Research Methods in International Relations*. London: Sage.
- Morgan, E. C. (2005). *Peacebuilding And Human Security: A Constructivist Perspective*. Spring / Summer.
- Moleong. L.J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- OIC. (2014). Resolutions on Muslim Communities and Minorities in Non-Oic Memberstates Adopted by The Forty-First Session of The Council of Foreign Ministers Session of Exploring Areas for Islamic Cooperation. Diakses pada <https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=322&refID=24>.
- OIC. (2016). Madani: Despite Some Progress the Campaign of Violence and Terror Against the Rohingya People Continues. Diakses pada https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=11714&ref=4598&lan=en.
- OIC. (2016). Madani: Despite Some Progress the Campaign of Violence and Terror Against the Rohingya People Continues. Diakses pada https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=11714&ref=4598&lan=en.
- OIC. (2016). New York OIC Group Holds Emergency Meeting to Discuss Latest Situation of the Rohingya Muslim Minority in Myanmar. Diakses pada https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=11958&ref=4694&lan=en.
- OIC. (2016). OIC Calls for Immediate Cessation of Violence in Myanmar. Diakses pada https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=11890&t_ref=4664&lan=en.
- OIC. (2016). OIC Distributes Ramadan Aid to Rohingya Families in IDP Camps. https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=11322&t_ref=4450&lan=en.
- OIC. (2016). OIC Expresses Concern at Deteriorating Situation in Rakhine State, Myanmar. Diakses pada https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=11837&ref=4645&lan=en.
- OIC. (2016). OIC Expresses Grave Concern at Outbreak of Violence in Rakhine State, Myanmar. Diakses pada https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=11699&ref=4592&lan=en.
- OIC. (2016). OIC Holds Iftar with Local Rohingya Community in Malaysia. Diakses pada https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=11304&ref=4442&lan=en.
- OIC. (2016). Speech of His Excellency Iyad Ameen Madani Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation at The Opening Session of the Forty Third Session of the Council of Foreign Ministers. Diakses pada https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=11721&t_ref=4600&lan=en.
- OIC. (2017). Final Communique Extraordinary Session of The OIC Council of Foreign Ministers (CFM) on The Situation of The Rohingya Muslim Minority in Myanmar. Diakses pada https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=13050&t_ref=5726&lan=en.
- OIC. (2017). OIC Condemns Renewed Violence in Myanmar and Calls Upon UNSC to Address the Issue. Diakses pada https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=14719&t_ref=6966&lan=en.
- OIC. (2017). OIC Welcomes Pope Visit to Myanmar. Diakses pada https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=17063&ref=9098&lan=en.
- OIC. (2017). UN Adopts OIC Sponsored Resolution on Myanmar. Diakses pada https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=16066&ref=8098&lan=en.
- OIC. (2023). About OIC. Diakses pada <https://www.oic-oci.org/home/?lan=en>.

- Publica News. OKI Khawatir Terjadi Genosida di Rohingya. (2017). Diakses dari https://www.publica-news.com/berita/internasional/2017/01/18/6349/OKI-khawatir-terjadi-genosida-di-rohingnya.html#google_vignette.
- Puri, C. N., & Yumitro, G. (2022). Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Penguatan Diplomasi Islam. *Sospol*, 8(1), 96–108.
- Rudy, T, M. (2009). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Setiawan, Asep. (2013). *Hubungan Internasional Abad Ke-21*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Sheany. Indonesia Urges OIC, International Community, to Adress Myanmar Conflict. (2017) <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-urges-oic-international-community-address-myanmar-conflict>.
- Smith, Nicola & Krol, Charlotte. 2017. Who are The Rohingya Muslims? The stateless minority fleeing violence in Burma. *Telegraph*. <https://www.telegraph.co.uk/news/0/Rohingya-Muslims/>.
- Soleman, Noviyanti (2017). *The Limitation of Organization of Islamic Cooperation in Solving Rohingya Problem*. Department of International Program of International Relations. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sukoco Manik. 2017. *Konflik Myanmar dan Dampaknya bagi Kemanusiaan*. Kumparan. <https://kumparan.com/manik-sukoco/konflik-myanmar-dan-dampaknya-bagi-kemanusiaan>.
- Syakur, Muhammad Abdus. Di KTT, Indonesia Dorong OKI Bekerja Sama Atasi Krisis Rohingya. (2017). Diakses dari <https://hidayatullah.com/berita/2017/09/12/123424/di-ktt-indonesia-dorong-OKI-bekerja-sama-atasi-krisis-rohingya.html>.
- The Data Team. 2017. The Rohingya Refugee Crisis Is The Worst In Decades. *The Economist*. <https://www.economist.com/graphic-detail/2017/09/21/the-Rohingya-refugee-crisis-is-the-worst-in-decades>.
- Wardah, Fathiyah. Konferensi Luar Biasa OKI Bahas Situasi Kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. (2017), <https://www.voaindonesia.com/a/OKI-bahas-situasi-di-rakhine-myanmar-/3681339.html>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.